

ANALISIS PEMBERDAYAAN SOSIAL JIM IFE PADA PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) PELATIHAN VOKASIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI SENTRA MULYA JAYA JAKARTA

Nawanisyyah Maura Laudya Hapsari, Atik Kurniawati, Evy Clara

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

nasyaqilla6@gmail.com

Diterima Redaksi: 12-08-2026 | Selesai Direvisi: 12-09-2026 | Diterbitkan Online: 26-09-2026

Abstract

Persons with disabilities in Indonesia continue to face structural barriers in education, employment, and social participation, so that empowerment-oriented rehabilitation is increasingly needed alongside charity-based social assistance. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the ATENSI vocational training program at Sentra Mulya Jaya Jakarta through Jim Ife's theory of social empowerment. This study employs a qualitative approach using the case study method, involving thirteen informants selected through purposive sampling technique, with data collected through in-depth interviews, limited participatory observation, documentation, and literature review, and analyzed using a thematic analysis technique consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that the ATENSI program proceeds through six interrelated stages, namely access and socialization, needs assessment, program planning, multidimensional implementation, monitoring and evaluation, and termination, and consistently strengthens individual capacity. The program operates most strongly through the strategies of planning and policy and of education and consciousness-raising, while social and political action and the reduction of structural inequality remain only partially achieved and largely dependent on external factors such as the 1% employment quota mandated by Law Number 8 of 2016. In addition, this study recommends strengthening family-based empowerment, providing structured sign-language training for accompanying staff, and reviewing the decile-based eligibility policy so that it better reflects the socioeconomic reality of persons with disabilities.

Keywords: Social Empowerment, Jim Ife's Theory, Disability, Vocational Training.

Abstrak

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial sehingga diperlukan pergeseran dari pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif menuju rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program ATENSI pelatihan vokasional di Sentra Mulya Jaya Jakarta melalui teori pemberdayaan sosial Jim Ife. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan tiga belas informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Program ATENSI berlangsung melalui enam tahap yang saling

berkesinambungan, yaitu akses dan sosialisasi, asesmen kebutuhan, perencanaan program, implementasi multidimensional, monitoring dan evaluasi, hingga terminasi, serta secara konsisten meningkatkan kapasitas individu. Program ini paling kuat beroperasi melalui strategi perencanaan dan kebijakan serta pendidikan dan penumbuhan kesadaran, sementara strategi aksi sosial dan politik serta pengurangan ketimpangan struktural baru tercapai sebagian dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti kuota kerja 1% dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pemberdayaan berbasis keluarga, pelatihan bahasa isyarat yang lebih terstruktur bagi tenaga pendamping, serta peninjauan kembali kebijakan desil agar lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Sosial, Teori Jim Ife, Disabilitas, Pelatihan Vokasional.*

Pendahuluan

Di banyak negara berkembang, penyandang disabilitas menempati posisi sosial yang rentan dan kerap berada dalam lingkaran kemiskinan, ketergantungan, serta eksklusi sosial. Kerentanan tersebut tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan fisik atau sensorik individu, tetapi juga dibentuk oleh struktur sosial yang membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan kerja, serta partisipasi ekonomi. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa disabilitas bukan hanya sebagai kondisi individual, melainkan juga sebagai konstruksi sosial yang diproduksi melalui relasi sosial, norma budaya, kebijakan publik, dan praktik kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif. World Health Organization melalui World Report on Disability menegaskan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan fungsi dengan hambatan lingkungan dan sikap sosial yang menghalangi partisipasi penuh dalam masyarakat (World Health Organization, 2011).

Di Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan urbanisasi, tantangan penyediaan layanan sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi semakin kompleks. Urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk, ruang publik yang belum ramah disabilitas, serta minimnya fasilitas pendukung mobilitas turut membatasi partisipasi sosial kelompok ini. Kompleksitas tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan disabilitas bukan semata persoalan individu, melainkan juga persoalan tata kelola kota dan kebijakan sosial yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip inklusivitas. Selama ini, intervensi sosial terhadap kelompok rentan cenderung didominasi pendekatan karitatif yang menempatkan mereka sebagai objek bantuan, sehingga berpotensi melanggengkan ketergantungan tanpa menyentuh akar persoalan struktural. Kondisi ini mendorong perlunya pergeseran paradigma menuju pemberdayaan sosial, yaitu proses penguatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol kehidupannya,

berpartisipasi aktif dalam ruang sosial, serta bergerak dari posisi subordinat menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Negara melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan pentingnya memastikan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran melalui mekanisme pembaruan data dan sinkronisasi lintas lembaga yang menunjukkan komitmen negara untuk tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kontribusi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, penyandang disabilitas termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi diri. Secara normatif, negara telah menjamin hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, termasuk hak atas pekerjaan dan kesempatan yang setara. Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menghapus hambatan sosial dan struktural. Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, minimnya aksesibilitas, serta sikap diskriminatif di lingkungan kerja masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum dan realitas sosial (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Secara nasional, perhatian akademik dan kebijakan terhadap isu disabilitas dan ketenagakerjaan menunjukkan tren yang terus meningkat, sejalan dengan data yang memperlihatkan besarnya kesenjangan yang masih harus diatasi. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi. Namun, hanya 21,65% di antaranya yang berstatus bekerja, sementara 78,35% sisanya belum atau tidak bekerja (Badan Pusat Statistik, 2023), dan hanya 1,73% dari seluruh perusahaan di Indonesia yang tercatat merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas hingga akhir tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Sejalan dengan data tersebut, tren kajian kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia secara bertahap bergeser dari fokus pada kebijakan bantuan sosial (Suharto, 2008) menuju penekanan pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok rentan sebagai paradigma utama intervensi sosial (Zubaedi, 2013; Pujileksono dkk., 2020). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih terkonsentrasi pada level kebijakan makro atau evaluasi program secara administratif. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik menelusuri bagaimana teori pemberdayaan sosial bekerja pada level mikro sebuah program vokasional bagi penyandang disabilitas sensorik, khususnya disabilitas rungu wicara, masih relatif terbatas jumlahnya. Dari pemetaan tren riset nasional inilah fokus penelitian ini ditentukan, yakni menelusuri secara empiris dan teoretis

bagaimana proses pemberdayaan sosial berlangsung dalam satu program pelatihan vokasional berbasis negara.

Urgensi meneliti isu ini secara akademik terletak pada kebutuhan untuk memahami mekanisme sosial di balik keberhasilan atau kegagalan program vokasional dalam mengubah posisi struktural penyandang disabilitas, sebuah persoalan yang tidak cukup dijawab hanya dengan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pelatihan, tetapi juga memerlukan analisis teoretis yang mampu membedah lapisan-lapisan kapasitas, relasi kekuasaan, dan kebijakan yang bekerja di dalamnya. Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi strategi pemberdayaan sosial yang berorientasi pada penguatan kapasitas, salah satunya melalui pelatihan vokasional. Pelatihan tidak hanya dimaknai sebagai transfer keterampilan teknis, tetapi juga sebagai medium pembentukan kepercayaan diri, disiplin sosial, etos kerja, dan identitas baru sebagai individu yang produktif. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok marjinal lainnya, dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). ATENSI tidak hanya dapat dipahami sebagai skema bantuan, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi antara negara, lembaga, dan penerima manfaat, yang sekaligus membentuk relasi, peran, serta pemaknaan tentang kemandirian dan kemampuan. Dengan demikian, kajian terhadap ATENSI dalam penelitian ini diposisikan bukan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan, melainkan sebagai penelitian sosiologis yang menempatkan Program ATENSI sebagai kasus untuk menguji dan memperkaya teori pemberdayaan sosial Jim Ife dalam konteks disabilitas di Indonesia.

Salah satu pelaksana ATENSI adalah Sentra Mulya Jaya Jakarta, Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Wanita Tuna Susila dan kini menampung berbagai kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, lansia, serta keluarga rentan sosial ekonomi. Transformasi kelembagaan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan korektif menuju rehabilitatif dan pemberdayaan. Di Sentra Mulya Jaya, penerima manfaat dibekali keterampilan produktif seperti menjahit, tata boga, salon, kerajinan tangan, komputer, dan desain grafis sebagai bekal reintegrasi sosial. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah banyak dikaji dari sisi implementasi dan capaian formal, sebagian besar penelitian masih menempatkan penerima manfaat sebagai objek program dan mengukur keberhasilan melalui

indikator kuantitatif semata, seperti jumlah peserta atau jenis pelatihan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap bagaimana penyandang disabilitas mengalami program dalam kehidupan sehari-hari, memaknai proses yang dijalani, serta bagaimana interaksi dengan pendamping dan lingkungan sentra membentuk cara mereka memandang diri, kemampuan, dan masa depan.

Pelatihan vokasional sering dianggap otomatis mampu membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri, padahal pada praktiknya penerima manfaat yang telah memiliki keterampilan belum tentu mudah memperoleh pekerjaan, sehingga kepemilikan keterampilan belum tentu secara langsung menghasilkan posisi sosial yang lebih baik atau menjamin kemandirian setelah program selesai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pemberdayaan sosial yang diberikan bagi penyandang disabilitas di Sentra Mulya Jaya Jakarta, bagaimana bentuk-bentuk Program ATENSI pelatihan vokasional dilaksanakan, dan bagaimana analisis Teori Pemberdayaan Sosial Jim Ife dapat menjelaskan proses tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan sosial, bentuk-bentuk program, dan penerapan teori pemberdayaan sosial Jim Ife pada Program ATENSI pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas di Sentra Mulya Jaya Jakarta, sekaligus diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi kajian sosiologi kesejahteraan sosial dan kontribusi praktis bagi evaluasi program berbasis pengalaman penerima manfaat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji proses pemberdayaan sosial secara mendalam dan kontekstual, serta menggali makna subjektif yang dimiliki individu dalam kehidupan sehari-hari (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Pendekatan ini sesuai untuk menelusuri bagaimana Program ATENSI dijalankan sebagai bentuk pemberdayaan sosial, serta bagaimana proses interaksi, pemaknaan, dan peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Unit analisis penelitian ini adalah penerima manfaat penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan vokasional dalam Program ATENSI di Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini melibatkan tiga belas informan yang terdiri atas tiga orang dari kelompok kerja struktural Sentra Mulya Jaya, dua pekerja sosial, dua instruktur kegiatan keterampilan, dua penerima manfaat aktif, dan empat alumni penerima manfaat, ditambah satu

informan triangulasi dari Komunitas Buah Tangan sebagai pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat penyandang disabilitas. Triangulasi sumber data ini digunakan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (Rahardjo, 2010).

Penelitian dilaksanakan di Sentra Mulya Jaya yang beralamat di Jalan Tat Twam Asi No. 47, RT 8/RW 2, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam kurun waktu Februari hingga April 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat aktivitas. Pertama, observasi partisipatif terbatas terhadap aktivitas pelatihan vokasional, terapi psikososial, dan interaksi sehari-hari antara penerima manfaat, instruktur, dan pekerja sosial di lingkungan sentra, yang dicatat dalam catatan lapangan untuk merekam konteks yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tiga level dan empat perspektif dalam teori pemberdayaan sosial Jim Ife, sehingga setiap pertanyaan diarahkan untuk menjangkau data mengenai kapasitas, relasi kekuasaan, dan ketimpangan struktural. Ketiga, dokumentasi berupa data internal sentra, profil kelembagaan, data penyaluran alumni, dan dokumentasi kegiatan vokasional. Keempat, studi pustaka atas peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan Kementerian Sosial, dan literatur akademik terkait pemberdayaan sosial dan disabilitas, sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat konteks teoretis dan regulatif atas temuan lapangan (Zed, 2008). Mengingat karakteristik sebagian informan, wawancara dengan penerima manfaat penyandang disabilitas rungu wicara yang masih aktif dilakukan secara tatap muka dengan bantuan mediator komunikasi, yaitu instruktur yang sehari-hari berinteraksi dengan penerima manfaat bersangkutan, sedangkan wawancara dengan informan alumni dilakukan secara mendalam melalui komunikasi berbasis teks mengingat keterbatasan jarak dan aksesibilitas komunikasi lisan. Kedua pendekatan tersebut diperlakukan setara sebagai data wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan prosedur yang sama.

Penggunaan instruktur sebagai mediator komunikasi dalam wawancara dengan penerima manfaat aktif disadari peneliti membawa keterbatasan metodologis tersendiri. Karena mediator adalah pihak yang juga berperan dalam pelaksanaan layanan sehari-hari di sentra, terdapat kemungkinan munculnya '*social desirability bias*', yaitu kecenderungan informan menyampaikan jawaban yang dianggap lebih diterima secara sosial dan menahan diri untuk menyampaikan kritik terbuka terhadap layanan sentra. Untuk meminimalkan risiko ini, peneliti menempuh dua langkah, yaitu menyampaikan secara eksplisit kepada informan bahwa jawaban

tidak akan memengaruhi status mereka di sentra, serta melakukan triangulasi silang antara pernyataan penerima manfaat aktif dengan pernyataan alumni yang diwawancarai secara mandiri melalui komunikasi berbasis teks tanpa kehadiran pihak sentra. Meskipun demikian, peneliti mengakui bahwa bias ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, sehingga temuan yang bersumber dari wawancara bermediator perlu dibaca dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya penghalusan kritik oleh informan.

Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, makna, serta dinamika pemberdayaan sosial dalam Program ATENSI melalui prosedur analisis tematik bertahap sebagaimana diuraikan lebih rinci pada paragraf berikut, dengan teori pemberdayaan sosial Jim Ife sebagai kerangka penuntun analisis (Ife, 1997). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikomparasikan untuk melihat pola kesesuaian dan perbedaan temuan, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Program ATENSI berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas.

Secara teknis, analisis data dilakukan mengikuti tahapan analisis tematik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi, transkrip wawancara, dan catatan observasi dibaca berulang untuk melakukan pengodean terbuka (*open coding*), yaitu memberi label pada satuan makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti “kendala akses”, “perubahan kepercayaan diri”, atau “hambatan kerja pascaterminasi”. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan melalui pengodean aksial (*axial coding*) ke dalam kategori yang lebih besar, misalnya kategori proses pelaksanaan program, kategori manfaat pemberdayaan, dan kategori hambatan struktural. Kategori-kategori ini kemudian disandingkan dengan tiga level dan empat perspektif dalam teori pemberdayaan sosial Jim Ife untuk menghasilkan tema-tema akhir yang menjadi struktur pembahasan, sebelum dilakukan verifikasi silang antar sumber data untuk memastikan konsistensi temuan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sentra Mulya Jaya Jakarta sebagai Pelaksana Program ATENSI

Sentra Mulya Jaya Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagai UPT, Sentra Mulya Jaya memiliki otonomi dalam pengelolaan layanan di lapangan, tetapi tetap berada dalam garis pertanggungjawaban hierarkis kepada kementerian induknya, sehingga menempatkannya sebagai wujud konkret dari tanggung jawab sosial negara (*state social responsibility*) dalam memastikan kelompok rentan memperoleh layanan rehabilitasi yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maupun inisiatif masyarakat sipil semata.

Secara historis, lembaga ini mengalami beberapa kali transformasi kelembagaan. Mulai dari Pusat Pendidikan Wanita pada tahun 1960 menjadi Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, kemudian ditetapkan sebagai Balai Rehabilitasi Sosial WATUNAS “Mulya Jaya” berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018, hingga akhirnya diintegrasikan menjadi Sentra Mulya Jaya melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan sosial, dari pendekatan berbasis kelompok sasaran tertentu dan bersifat korektif menuju pelayanan rehabilitasi sosial yang lebih inklusif dan menekankan pemberdayaan. Landasan hukum utama penyelenggaraan pelayanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas kesempatan yang setara dalam pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan, sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya.

Sentra Mulya Jaya memiliki visi “Terwujudnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri, berkepribadian, dan bermartabat” yang diwujudkan melalui misi penyediaan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar, penguatan manajemen layanan yang akuntabel, serta peningkatan kemandirian penerima manfaat. Nilai dasar pelayanan dirumuskan dalam motto RAMAH (Responsif, Akuntabel, Membangun Jejaring, Aktif, dan Holistik). Secara struktural, Kepala Sentra bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator utama, didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha yang menangani fungsi administratif, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan instruktur vokasional sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat. Struktur ini menunjukkan sistem organisasi yang terintegrasi antara fungsi manajerial, administratif, dan teknis, sekaligus menjadi fondasi kelembagaan yang menopang pelaksanaan Program ATENSI pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas rungu wicara sebagai kelompok sasaran utama dalam penelitian ini.

Bentuk dan Proses Pelaksanaan Program ATENSI Pelatihan Vokasional

Program ATENSI di Sentra Mulya Jaya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan vokasional, tetapi juga melalui berbagai intervensi yang bersifat multidimensional. Sebagai sistem layanan terpadu yang berangkat dari mandat negara, ATENSI mencakup enam komponen yang saling menopang, yaitu pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan pengasuhan, dukungan keluarga dan terapi, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, serta bantuan sosial dan aksesibilitas. Setiap komponen didesain sebagai satu kesatuan pemberdayaan yang menjawab kebutuhan individu secara holistik, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Program ATENSI di Sentra Mulya Jaya Jakarta

Program ATENSI	Bentuk Layanan	Tujuan Pemberdayaan
Pemenuhan Hidup Layak	Pengasramaan, makanan, <i>hygiene kit</i>	Memenuhi kebutuhan dasar sebagai prasyarat pemberdayaan
Perawatan Sosial & Pengasuhan	Terapi psikososial, mental spiritual, seni, dan fisik	Penguatan keberfungsian emosional dan sosial individu
Pelatihan Vokasional & Kewirausahaan	Desain grafis, komputer, menjahit, <i>handicraft</i> , tata boga, salon	Peningkatan kapasitas dan keterampilan produktif berbasis minat
Dukungan Keluarga & Terapi	<i>Family support</i> , pendampingan pascaterminasi	Menjaga keberlanjutan perubahan di lingkungan sosial asal
Bantuan Sosial & Aksesibilitas	Bantuan modal usaha, alat produksi, alat bantu disabilitas	Membuka akses ekonomi dan kemandirian pascaprogram

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026.

Salah satu bentuk utama pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan kapasitas ekonomi berbasis pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan minat serta potensi individu. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Pokja Penyandang Disabilitas:

“Sehingga kita memberdayakan dia di sini, supaya dia berguna, berdaya, berdiri... kalau memang itu bisa berkembang dengan dirinya dia akan bisa memenuhi kebutuhan dia.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban metodologis atas klaim bahwa pelatihan diarahkan pada penguatan kapasitas yang berlapis. Frasa “berguna, berdaya, dan berdiri” mengandung dimensi berlapis: berguna merujuk pada pengakuan sosial, berdaya pada kapasitas internal, dan berdiri pada kemandirian struktural. Ketiganya merupakan hasil kumulatif dari seluruh komponen program yang bekerja secara sinergis. Namun demikian, pelatihan vokasional dalam praktiknya tidak berlangsung secara seragam, karena setiap penerima manfaat memiliki latar belakang, kemampuan, dan daya tangkap yang berbeda sehingga keberhasilan tidak dapat diukur semata dari penguasaan keterampilan tertentu, tetapi dari sejauh mana individu mengalami peningkatan kapasitas sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Dilihat dari dinamika pemilihan kelas, jenis pelatihan yang tersedia di Sentra Mulya Jaya, seperti menjahit, tata boga, dan salon di satu sisi, serta desain grafis dan komputer di sisi lain, secara konvensional lekat dengan pembagian peran gender dalam masyarakat. Keterampilan domestik-perawatan cenderung diasosiasikan dengan perempuan, sementara keterampilan berbasis teknologi cenderung diasosiasikan dengan laki-laki (Fakih, 2013). Penelitian ini tidak menghimpun data pemilihan kelas secara sistematis berdasarkan jenis kelamin penerima manfaat sehingga belum dapat dipastikan sejauh mana pola tersebut benar-benar terjadi dalam praktik pemilihan kelas vokasional di Sentra Mulya Jaya, atau sebaliknya apakah proses asesmen berbasis peminatan yang diterapkan sentra justru cukup terbuka bagi penerima manfaat lintas gender untuk memilih jenis pelatihan di luar pola konvensional tersebut. Ketiadaan data disagregasi gender ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini sehingga kajian lanjutan yang secara khusus menelusuri relasi antara jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan pilihan jenis pelatihan vokasional menjadi penting untuk memastikan bahwa proses asesmen minat di Sentra Mulya Jaya benar-benar bebas dari bias gender struktural, bukan sekadar mereproduksi pembagian peran yang telah ada di masyarakat.

Pemberdayaan juga diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap dunia kerja formal. Dalam hal ini, Sentra Mulya Jaya menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan mitra untuk menyalurkan penerima manfaat yang dinilai siap kerja. Akses ini bersifat selektif karena terdapat proses penilaian kelayakan kerja sehingga menghadirkan ketegangan antara realisme terhadap tuntutan dunia kerja dan potensi reproduksi hierarki di antara penerima manfaat. Bagi

yang belum terserap ke dunia kerja formal, pemberdayaan diarahkan pada kemandirian berbasis keluarga dan kewirausahaan melalui dukungan alat produksi dan penguatan keterampilan, serta melalui Sentra Kreasi ATENSI (SKA) sebagai ruang produksi sekaligus pemasaran produk hasil pelatihan. Meskipun demikian, akses pasar yang tersedia masih relatif terbatas dan cenderung bergantung pada lingkungan internal sentra sehingga penguatan ke depan idealnya mencakup diversifikasi saluran distribusi, termasuk platform digital dan kemitraan dengan usaha lokal.

Sebelum pelatihan itu sendiri berlangsung, Program ATENSI melewati serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari tahap akses dan sosialisasi yang membuka ruang bagi calon penerima manfaat atau keluarga untuk mengenal program, dilanjutkan dengan asesmen dan identifikasi kebutuhan berbasis peminatan (*strengths-based assessment*) untuk menyusun Rencana Intervensi Individual. Tahap berikutnya adalah perencanaan program oleh para pemangku kepentingan. Implementasi yang bersifat multidimensional mencakup pelatihan teknis, terapi psikososial dan mental spiritual, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, hingga tahap terminasi bagi penerima manfaat yang telah mengikuti program selama tiga hingga delapan bulan. Setiap tahapan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang bagi kebutuhan, potensi, dan kondisi individu dikenali, direspons, serta diartikulasikan menjadi rencana pemberdayaan yang kontekstual. Meskipun begitu, proses ini juga tidak sepenuhnya bebas dari dinamika kebijakan eksternal, seperti kebijakan desil yang turut memengaruhi akses dan bentuk layanan yang diterima oleh penerima manfaat.

Hambatan kebijakan desil dalam tahap akses dan sosialisasi patut diuraikan lebih rinci karena berdampak langsung pada kelayakan penerima manfaat untuk mendapatkan layanan. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa penerima manfaat yang berhak atas layanan penuh, termasuk bantuan terminasi adalah mereka yang berada pada desil 1–5 dalam Data Sosial Ekonomi Terpadu, yaitu kelompok yang secara resmi dikategorikan sebagai 50% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Residensial Vokasional:

“Kami terbuka untuk berapapun yang mendaftar, tapi ada kebijakan baru yang bisa kita terima itu yang berada di desil 1–5. Kemudian kami diskusi dengan ibu kasentra, gimana kalau kita mengikuti aturan sekarang yang berada di desil 1–5 kita akan sulit untuk menerima PM-PM yang disabilitas. Karena ternyata, ketika mereka mau daftar, kita mintakan KTP, kita cek, dia ada di desil 6–10 kebanyakan.”

Kutipan tersebut memperlihatkan persoalan operasional yang nyata di lapangan: banyak calon penerima manfaat penyandang disabilitas yang mendaftar justru berada pada desil 6–10

ketika data kartu tanda penduduknya diverifikasi, sehingga secara administratif tidak memenuhi syarat meskipun secara sosial tetap menghadapi hambatan struktural yang signifikan akibat kondisi disabilitasnya. Ketidaksesuaian ini bersumber dari perbedaan basis logika antara dua kebijakan yang seharusnya berjalan beriringan, yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menyasar kerentanan ekonomi rumah tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin akses layanan berdasarkan kondisi disabilitas tanpa mensyaratkan status ekonomi tertentu. Di lapangan, benturan dua logika kebijakan tersebut direspons oleh Sentra Mulya Jaya melalui solusi pragmatis berupa stratifikasi hak layanan: pendaftaran tetap dibuka bagi seluruh desil, tetapi penerima manfaat pada desil 6–10 hanya dapat mengikuti pelatihan dan kegiatan di sentra secara penuh tanpa memperoleh bantuan terminasi berupa modal usaha maupun alat produksi yang menjadi bekal kemandirian pascaprogram.

Solusi tersebut menyelesaikan persoalan akses di awal program, tetapi memindahkan persoalan ketimpangan ke tahap akhir karena penerima manfaat dari keluarga desil menengah tetap memperoleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan, tetapi tanpa modal untuk mengonversi kapasitas tersebut menjadi mata pencaharian yang mandiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penggunaan kriteria kemiskinan ekonomi sebagai pintu masuk layanan disabilitas berisiko menimbulkan kesenjangan baru di antara sesama penerima manfaat penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, rekomendasi peninjauan kebijakan desil dalam penelitian ini diarahkan pada pemisahan kriteria kelayakan antara komponen bantuan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan terminasi, dengan komponen layanan rehabilitasi dan pelatihan vokasional yang seharusnya tetap terbuka bagi seluruh penyandang disabilitas tanpa memandang desil ekonominya, sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Manfaat Pemberdayaan Sosial bagi Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas

Perubahan yang dialami penerima manfaat tidak berlangsung dalam satu momen tunggal, tetapi terakumulasi secara berlapis sepanjang tahapan program dan dapat diidentifikasi pada tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu perubahan kapasitas keterampilan, perubahan psikososial, dan perubahan orientasi masa depan. Pada dimensi keterampilan, peningkatan kapasitas terjadi secara bervariasi, sangat bergantung pada minat, pengalaman awal, dan karakteristik masing-masing individu. N, alumni yang kini bekerja di PT Yamaha, menyatakan bahwa pelatihan desain grafis secara langsung membantunya memperoleh pekerjaan:

“Saya jadi mendapatkan skill baru. Saya jadi dapat kerja di Yamaha.”

R, alumni yang kini bekerja mandiri sebagai *makeup artist*, menggambarkan perubahan yang lebih luas:

“Saya jadi lebih memahami teknik makeup, lebih percaya diri, memahami produk dengan lebih baik, dan mulai berani membangun usaha sendiri.”

Meskipun demikian, peningkatan keterampilan tidak selalu berujung pada penyerapan kerja formal. Sebagian alumni tetap menghadapi hambatan akses kerja akibat terbatasnya perusahaan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis belum sepenuhnya mampu menghilangkan hambatan struktural yang ada di luar sentra.

Pada dimensi psikososial, penerima manfaat menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, stabilitas emosi, dan kemampuan bersosialisasi lintas komunitas. Pekerja sosial pendamping mengamati perubahan pada penerima manfaat A, dari individu yang semula sangat bergantung pada keluarga menjadi sosok yang diandalkan oleh sesama penerima manfaat:

“Awal-awal masih ke orang tua banget...tapi makin ke sini anaknya sudah makin mandiri, sosialnya meningkat. Sekarang lebih bisa diandalkan... kalau ada PM baru datang, A bisa jadi contoh.”

Perluasan jaringan sosial ke luar komunitas disabilitas juga merupakan dampak psikososial yang bermakna, sebagaimana diamati oleh Tim Komunitas Buah Tangan:

“Yang dikira menjadi keterbatasan, ternyata mereka punya sensitivitas sendiri. Mereka merasakan musik itu lewat getaran, mereka melihat dari bagaimana benda-benda tersebut itu bisa bergetar. Itu yang selalu menjadi apa ya, selalu membuat amaze para volunteer.”

Pengalaman tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan yang efektif membutuhkan perubahan cara pandang dari semua pihak, bukan hanya dari penerima manfaat semata. Pada dimensi orientasi masa depan, penerima manfaat mengembangkan rencana hidup yang lebih terstruktur, mulai dari bekerja di perusahaan sebelum membangun usaha mandiri, hingga memaknai proses pelatihan sebagai ruang untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan diri, meskipun keterampilan teknis yang diperoleh tidak selalu relevan secara langsung dengan pekerjaan yang dijalani.

Tabel 2. Data Penyaluran Alumni Sentra Mulya Jaya Periode 2015–2025

Kategori	Jumlah/Proporsi	Kisaran Gaji (Rp/bulan)	Keterangan
Total alumni tersalurkan	103 orang	-	Mayoritas disabilitas sensorik rungu wicara
Perusahaan mitra	13 perusahaan	-	Tersebar di berbagai sektor industri
Karyawan kontrak	59,2%	2.500.000 – 4.000.000	Status terbanyak
<i>Freelancer</i> / wirausaha	27,2%	Tidak menentu	Termasuk alumni wirausaha mandiri
Karyawan tetap	6,8%	≈ 6.110.000	Masa kerja hingga 8 tahun
Magang	6,8%	Sesuai UMR/skema magang	Tahap transisi ke kerja formal

Sumber: Dokumen Internal Sentra Mulya Jaya Jakarta, 2025.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dominasi status karyawan kontrak sebesar 59,2% dapat dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan keberhasilan program dalam membantu alumni memasuki dunia kerja formal, sesuatu yang penting mengingat penyandang disabilitas rungu wicara masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, dominasi pekerjaan kontrak juga menunjukkan adanya kerentanan dalam keberlanjutan kerja karena status kontrak umumnya belum memberikan kepastian jangka panjang. Dengan demikian, tingginya angka penyaluran kerja belum tentu sepenuhnya mencerminkan keberdayaan yang optimal sehingga evaluasi program seharusnya tidak hanya memperhatikan jumlah alumni yang bekerja, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh. Temuan ini juga menegaskan bahwa pemberdayaan tidak menghasilkan perubahan yang seragam meskipun berada dalam program, sentra, dan pendampingan yang

sama, karena hasil pemberdayaan dipengaruhi oleh karakteristik individu, kualitas dukungan sosial, ketepatan pencocokan minat dan jenis pelatihan, serta faktor struktural eksternal berupa aksesibilitas dunia kerja yang inklusif.

Analisis Teori Pemberdayaan Sosial Jim Ife pada Program ATENSI Pelatihan

Vokasional

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang berada dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan melalui penguatan kapasitas dan kesadaran secara sistematis (Sudarmanto dkk., 2020). Dalam buku *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*, Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depan sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya (Ife, 1997). Ife menegaskan bahwa pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok, yakni *power* (daya) dan *disadvantaged* (ketimpangan), karena pemberdayaan pada dasarnya adalah proses redistribusi daya dari pihak yang dominan kepada mereka yang selama ini tidak memiliki akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengakuan sosial. Dalam konteks penyandang disabilitas, ketimpangan ini bersifat berlapis karena tidak hanya muncul dari kondisi fisik atau sensorik individu, tetapi juga dari cara masyarakat, institusi, dan kebijakan membangun hambatan yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Untuk menilai sejauh mana pemberdayaan benar-benar terjadi, penelitian ini menggunakan kerangka tiga level yang melekat pada teori Ife, yaitu peningkatan kapasitas individu, perubahan relasi kekuasaan, dan pengurangan ketimpangan struktural yang bersifat berjenjang karena pemberdayaan yang utuh mensyaratkan bahwa penguatan pada level pertama dapat dikonversi menjadi perubahan pada level kedua dan ketiga, bukan berhenti pada level pertama saja. Pada level pertama, peningkatan kapasitas individu tercapai secara konsisten karena hampir seluruh komponen program secara langsung berfungsi meningkatkan kapasitas teknis dan psikososial sebagaimana diuraikan pada Hasil Penelitian. Namun demikian, kapasitas individu yang kuat belum secara otomatis berkonversi menjadi level berikutnya. Pada sebagian penerima manfaat, konversi menuju daya (*power*) berhasil dicapai, misalnya melalui keberhasilan membangun usaha mandiri atau terserap ke perusahaan formal disertai pengakuan keluarga. Sementara itu, pada penerima manfaat lain, kapasitas yang sama tidak serta-merta

memberi daya untuk menegosiasikan posisi di pasar kerja, terutama ketika mengalami kegagalan berulang dalam seleksi kerja pascaterminasi.

Kondisi ini diperkuat oleh gambaran *bounded agency*, yakni penerima manfaat memang diberi pilihan, tetapi pilihan tersebut tetap berasal dari menu yang ditentukan institusi, bukan dari negosiasi ulang antara penerima manfaat dan institusi mengenai apa yang seharusnya tersedia. Sebagai program pemerintah, ATENSI pada dasarnya lahir dari kebijakan *top-down* dengan institusi sebagai penentu kerangka layanan, jenis pelatihan, dan durasi program berdasarkan mandat regulasi, bukan hasil musyawarah dari bawah. Elemen *bottom-up* memang ada, seperti asesmen berbasis peminatan dan kolaborasi dengan komunitas sipil. Namun, elemen ini masih terbatas pada level pelaksanaan individual dan belum menjangkau level perencanaan dan evaluasi program secara struktural sehingga ATENSI dapat digambarkan sebagai program *top-down* dengan ruang partisipatif terbatas (*bounded participation*). Pada level ketiga, pengurangan ketimpangan struktural belum tercapai secara mandiri dan sangat bergantung pada faktor eksternal. Perubahan paling signifikan dalam relasi antara sentra dan dunia usaha, dari kesulitan mencari perusahaan mitra menjadi perusahaan yang datang sendiri terjadi karena kuota 1% dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkannya, bukan karena ATENSI berhasil mengubah struktur pasar kerja melalui advokasinya sendiri. Oleh karena itu, ketimpangan struktural belum benar-benar tereduksi, tetapi hanya berubah bentuk dari “tidak diterima” menjadi “diterima tetapi rentan” sebagaimana tercermin dari dominasi status karyawan kontrak pada Tabel 2.

Pemberdayaan Sosial melalui Perencanaan dan Kebijakan

Pemberdayaan sosial melalui perencanaan dan kebijakan merupakan tulang punggung Program ATENSI. Seluruh komponen program, mulai dari asesmen individual, rancangan intervensi, pelatihan terstruktur, terapi psikososial, hingga jaringan terminasi merupakan manifestasi dari strategi ini. Dalam perspektif Ife, kemampuan menentukan pilihan pribadi dan kemampuan menentukan kebutuhan sendiri paling kuat terwujud dalam dimensi ini. Kemampuan menentukan pilihan pribadi tercermin dalam kebijakan sentra yang mensyaratkan keikutsertaan berdasarkan kemauan penerima manfaat sendiri melalui mekanisme kontrak persetujuan sebagai instrumen formal yang melindungi otonomi individu. Pilihan ini tetap beroperasi dalam *bounded agency* karena jenis pelatihan yang dipilih berasal dari menu yang telah ditetapkan institusi.

Dimensi ini berkaitan erat dengan perspektif elitis dalam kerangka Ife yang memandang pemberdayaan sebagai upaya memengaruhi kelompok yang memegang kekuasaan agar menggunakan posisinya untuk membuka akses bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Kewajiban sosial negara terhadap golongan lemah tidak hanya didasarkan pada solidaritas, tetapi juga pada tuntutan keadilan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan sering kali merupakan akibat dari ketidakadilan struktural, bukan kekurangan individual (Nell-Breuning, 1968; Rawls, 1977). Dimensi elitis ini tampak nyata dalam pergeseran relasi antara Sentra Mulya Jaya dan dunia usaha. Sebelum adanya kewajiban kuota pekerja disabilitas, pihak sentra harus berjuang keras meyakinkan perusahaan agar mau menerima penyandang disabilitas. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan kuota 1%, semakin banyak perusahaan yang datang sendiri ke sentra. Pergeseran ini mencerminkan bagaimana perubahan kebijakan di tingkat makro dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pemberdayaan di tingkat mikro.

Pemberdayaan Sosial melalui Aksi-Aksi Sosial dan Politik

Strategi pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik dalam Program ATENSI saat ini masih bersifat reaktif dan belum berkembang secara sistematis. Dimensi ini tampak ketika sentra secara aktif merujuk mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk mempertahankan keterbukaan layanan di tengah tekanan kebijakan desil, atau ketika pihak sentra mendorong perusahaan yang awalnya ragu untuk membuka diri terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Namun, advokasi semacam ini belum berkembang menjadi agenda yang terencana dan berkelanjutan. Dimensi ini berkaitan erat dengan perspektif strukturalis dalam kerangka Ife yang memandang pemberdayaan sebagai agenda yang lebih mendasar, yaitu menghapus ketimpangan struktural yang menjadi akar dari marginalisasi. Oleh karena itu, sistem itu sendiri harus diubah agar lebih adil dan inklusif, bukan hanya mempersiapkan individu agar mampu bersaing dalam sistem yang ada.

Meskipun Program ATENSI tidak secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai program transformasi struktural, beberapa intervensi yang dilakukan menyentuh dimensi ini, misalnya Program Mega Kertas yang dirancang sebagai jembatan antara pelatihan vokasional dan dunia kerja yang secara implisit mengakui bahwa kesiapan individu saja tidak cukup dan sistem transisi menuju kerja pun harus dibangun secara khusus. Kolaborasi dengan komunitas sipil seperti Komunitas Buah Tangan juga secara perlahan mengikis prasangka dan hambatan sosial yang selama ini membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Aspek kapasitas berupa

akses pada sumber daya ekonomi paling langsung dipengaruhi oleh berhasil atau tidaknya dimensi ini yang terwujud melalui bantuan modal usaha dan alat produksi saat terminasi, penyaluran ke perusahaan mitra, serta Sentra Kreasi ATENSI sebagai kanal pemasaran produk. Dominasi status karyawan kontrak sebesar 59,2% menunjukkan bahwa akses ekonomi yang diperoleh masih bersifat rentan sehingga advokasi struktural yang lebih sistematis menjadi kebutuhan mendesak agar capaian pemberdayaan individual tidak terhenti di pintu masuk dunia kerja.

Pemberdayaan Sosial melalui Pendidikan dan Penumbuhan Kesadaran

Strategi pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran dijalankan dengan intensitas yang tinggi oleh Program ATENSI. Pelatihan vokasional, terapi psikososial dan mental spiritual, Program Mega Kertas, pendampingan pekerja sosial, serta kolaborasi dengan komunitas sipil bekerja dalam kerangka strategi ini, dengan tujuan tidak hanya membekali pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa penerima manfaat adalah individu yang memiliki hak, kapasitas, dan peluang untuk menentukan arah hidupnya secara mandiri. Kebebasan berekspresi paling kuat terwujud dalam dimensi ini melalui terapi seni, psikososial, dan mental spiritual yang menyediakan saluran ekspresi yang beragam bagi penerima manfaat. Data lapangan juga menangkap bahwa kapasitas pengelolaan emosi masih perlu terus dikembangkan, mengingat keterbatasan komunikasi verbal tidak menghilangkan kebutuhan emosional, tetapi menggeser cara ekspresinya ke saluran lain.

Dimensi ini berkaitan langsung dengan perspektif post-strukturalis dalam kerangka Ife yang menekankan bahwa pemberdayaan juga beroperasi melalui perubahan cara masyarakat memahami dan memaknai kelompok yang termarginalkan, karena bahasa, pengetahuan, dan cara pandang terhadap disabilitas bukan sekadar cerminan realitas, melainkan aktif membentuk realitas tersebut. Interaksi antara relawan komunitas sipil dan penerima manfaat tuli menunjukkan bagaimana relawan yang semula datang dengan niat membantu justru meninggalkan kegiatan dengan cara pandang yang berubah. Pertemuan semacam ini tidak hanya mengubah kondisi penerima manfaat, tetapi juga secara aktif mengubah cara masyarakat umum memahami disabilitas. Meski demikian, proses kolaborasi juga menunjukkan tantangan dalam aspek aksesibilitas komunikasi, khususnya terkait penguasaan bahasa isyarat, karena tidak semua instruktur atau relawan memiliki kemampuan bahasa isyarat yang memadai. Oleh karena itu, inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas rungu wicara tidak hanya bergantung

pada kesiapan individu disabilitas, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam membangun sistem komunikasi yang lebih aksesibel.

Secara keseluruhan, melalui lensa teori pemberdayaan sosial Jim Ife, Program ATENSI dapat dipahami sebagai upaya pemberdayaan yang bergerak secara simultan pada keempat perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis, meskipun dengan derajat kesengajaan dan kedalaman yang berbeda-beda. Program paling kuat beroperasi dalam dimensi pluralis melalui peningkatan keterampilan dan akses kerja, serta dalam strategi pendidikan dan penumbuhan kesadaran melalui pelatihan multikomponen dan kolaborasi komunitas sipil. Sementara itu, dimensi strukturalis dan strategi aksi sosial-politik masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis, terutama dalam hal advokasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif dan normalisasi sosial terhadap kapasitas penyandang disabilitas. Temuan ini bukan menunjukkan kegagalan kebijakan, melainkan kebutuhan penguatan pada level pelaksanaan dan sumber daya manusia yang menjalankannya, mengingat perubahan yang paling bertahan lama justru bersifat nonteknis, seperti kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi lintas komunitas, mentalitas produktif, dan keyakinan bahwa masa depan dapat dibentuk secara aktif.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program ATENSI pelatihan vokasional di Sentra Mulya Jaya Jakarta merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang beroperasi secara multidimensional melalui enam tahap yang saling berkesinambungan, mulai dari akses dan sosialisasi hingga terminasi, dan secara konsisten berhasil meningkatkan kapasitas individu penyandang disabilitas pada dimensi keterampilan teknis, psikososial, hingga orientasi masa depan. Namun, ketika dianalisis melalui tiga level teori pemberdayaan sosial Jim Ife, peningkatan kapasitas tersebut tidak secara otomatis berkonversi menjadi perubahan relasi kekuasaan atau pengurangan ketimpangan struktural. Hal ini disebabkan karena keduanya sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti regulasi kuota kerja 1% dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, daripada kapasitas advokasi mandiri program itu sendiri. Dari keempat perspektif dalam kerangka Ife, Program ATENSI ditemukan paling kuat beroperasi pada strategi perencanaan dan kebijakan serta pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Sementara itu, strategi aksi sosial dan politik masih bersifat reaktif dan memerlukan penguatan yang lebih sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas tidak dapat diukur hanya dari indikator penyaluran kerja semata, tetapi harus memperhitungkan kualitas

dan keberlanjutan perubahan yang dialami penerima manfaat, sebagaimana tercermin dari data yang menunjukkan bahwa 59,2% alumni masih berstatus karyawan kontrak yang rentan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Sosial dan Sentra Mulya Jaya memperkuat komponen pemberdayaan berbasis keluarga (*family empowerment*) dan pemantauan pascaterminasi (*post-termination monitoring*) sebagai bagian inti keberlanjutan program, menyediakan pelatihan bahasa isyarat yang sistematis bagi seluruh instruktur dan pekerja sosial, serta mengembangkan instrumen evaluasi partisipatif yang mampu menangkap perubahan psikososial dan kualitas keberlanjutan kerja alumni. Pengambil kebijakan di tingkat nasional juga perlu meninjau kembali kebijakan desil sebagai syarat penerimaan layanan rehabilitasi sosial agar lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi penyandang disabilitas, serta memperkuat mekanisme pengawasan atas regulasi kuota 1% agar tidak hanya berdampak pada jumlah perusahaan yang terbuka, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan kerja yang diterima oleh alumni penyandang disabilitas.

Terkait keberlanjutan karier alumni secara khusus, temuan pada Tabel 2 yang menunjukkan dominasi status karyawan kontrak sebesar 59,2% menegaskan perlunya rekomendasi yang lebih operasional. Sentra Mulya Jaya perlu mengembangkan mekanisme pelacakan alumni (*alumni tracer study*) secara berkala, minimal pada titik enam bulan, satu tahun, dan tiga tahun pascaterminasi, untuk memantau status pekerjaan, transisi dari kontrak ke tetap, maupun keberlanjutan usaha mandiri alumni. Data pelacakan ini dapat menjadi dasar bagi sentra dan Kementerian Sosial untuk melakukan advokasi yang lebih terarah kepada perusahaan mitra, misalnya dengan mendorong klausul evaluasi perpanjangan kontrak yang mempertimbangkan kinerja aktual alumni dan bukan semata status disabilitasnya, serta untuk mengidentifikasi jenis pelatihan vokasional yang secara empiris memiliki tingkat keberlanjutan kerja lebih tinggi, sehingga alokasi program ke depan dapat lebih diarahkan pada jenis keterampilan yang terbukti membuka jalur karier yang lebih stabil bagi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022. Jakarta: BPS RI.
Diakses dari: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Buku I Analisis Tematik Kependudukan Indonesia: Disabilitas. Jakarta: BPS RI. Diakses dari: <https://www.bps.go.id>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Favourita, L., dkk. (2025). *Praktik Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Sosial*. Bandung: Perpustakaan Poltekesos.
- Ife, J. (1997). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Diakses dari: <https://kemensos.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Profil Sentra Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Diakses dari: <https://rehabsos.kemensos.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nell-Breuning, O. von. (1968). *Gesellschaftsordnung*. Freiburg: Herder.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Pujileksono, S., dkk. (2020). *Implementasi Teori, Teknik, dan Prinsip Pekerjaan Sosial: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rawls, J. (1977). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritzer, G. (2012). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sudarmanto, E., dkk. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO. Diakses dari: <https://www.who.int>
- Zastrow, C., dkk. (2013). *Understanding Human Behavior and the Social Environment*. Boston: Cengage Learning.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.